

PERUBAHAN PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PPS

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 29/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Surat pengunduran diri Sdr. Jianto sebagai PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar tanggal 15 Juni 2013;
Berita Acara PPS Kelurahan Delingan Nomor : 01/BA/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 tentang Pergantian Ketua PPS;
Bahwa Sdr. Jianto telah mengundurkan diri sebagai Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;
Bahwa PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar telah menyelenggarakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : Nomor : 01/BA/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, memutuskan Sdr. Wardoyo sebagai Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPS Se Kabupaten Karanganyar pada Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 28/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 29/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 19/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 3. Karanganyar 11. Delingan 1. Wardoyo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan tanggal 26 Juni 2013.